

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai FEATI (*Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information / FEATI Project*) di beberapa daerah, terdapat berbagai perbedaan, persamaan, tujuan serta metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti mengenai peningkatan pendapatan petani.

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arti (2011) pada thesis yang meneliti tentang analisis dampak Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) terhadap peningkatan kesejahteraan petani (Studi Kasus : FMA Desa Mangunsari Kec. Windusari Kab. Magelang) dilakukan dengan tujuan umum untuk menganalisis dampak pelaksanaan P3TIP di Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang terhadap peningkatan kesejahteraan petani peserta pembelajarannya. Tujuan khususnya adalah untuk menganalisis apakah P3TIP dapat meningkatkan pendapatan petani melalui pembelajaran tentang teknologi dan informasinya, menganalisis apakah P3TIP dapat meningkatkan partisipasi peserta dalam perencanaan kegiatan penyuluhan dan kegiatan masyarakat pada umumnya, serta menganalisis apakah FMA dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan usahanya.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dari 60 responden yang terdiri dari 30 responden peserta pembelajaran dan 30 responden kontrol (bukan peserta pembelajaran). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kuesioner serta wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci. Dengan menggunakan analisis uji beda dua rata-rata berpasangan, terhadap pendapatan bersih sebelum dan sesudah pembelajaran pada responden peserta, diperoleh bahwa P3TIP melalui pembelajaran FMA memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan bersih/keuntungan petani, dengan nilai uji t sebesar  $-4,763$  ( $\alpha=5$  persen).

Menggunakan metode Difference-in-Differences, juga diperoleh hasil bahwa P3TIP memberikan dampak bersih sebesar 106,6 persen (setara dengan Rp8.517.790,73) terhadap peningkatan pendapatan bersih petani. Pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi merupakan suatu proses dari sistem penyuluhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, melainkan suatu hubungan yang bersinergi antara lembaga penelitian, instansi pelaksana penyuluhan, kelembagaan petani dan petani itu sendiri. Teknologi yang lebih cepat diadopsi oleh petani adalah teknologi yang berbahan dasar lokal, sedangkan pembelajaran dari petani ke petani dan sesuai dengan kebutuhan petani ternyata lebih efektif dalam merubah pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam usahatani, yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Yuwono (2012) pada seminar nasional kedaulatan pangan dan energi fakultas pertanian Universitas Trunojoyo Madura meneliti tentang Peran Farmer Empowerment trough Agricultural Technology and Information (FEATI) dalam mendukung pengembangan agribisnis Kambing-Domba di Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adopsi teknologi yang dilakukan untuk menelaah peran FEATI dalam pemberdayaan petani untuk mendukung kedaulatan pangan khususnya pada komoditas ternak Kambing-Domba di Jawa Tengah.

Metode pengembangan kapasitas pelaku utama (petani/peternak) yang diterapkan FEATI adalah melalui kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri. Petani/peternak difasilitasi melakukan pembelajaran partisipatif, menerapkan teknologi adaptif inovatif, serta berorientasi pada pasar sehingga berkemng pengembangan agribisnis berkelompok berbasis keunggulan wilayah. Tujuan produksi yang mengarah pada pembibitan secara intensif pada implementasi FEATI di provinsi Jawa Tengah belum mendapat perhatian yang banyak walaupun ada hanya berkisar 2-3 ekor/peternak.

Pembelajaran agribisnis yang difasilitasi FEATI mendorong tumbuhnya kelembagaan ekonomi di beberapa FMA dalam bentuk KUB yang telah melakukan berbagai tindakan konsolidasi, seperti pada penerapan teknologi mengakses pasar dan permodalan, maupun menetapkan berbagai aturan yang harus ditaati anggota.

Dukungan permodalan dalam pengembangan agribisnis ternak kado adalah dari skim kredit KKP-E dan bantuan sosial dalam bentuk PUAP.

Persamaan yang terjadi pada penelitian Arti (2011) adalah mengangkat tentang analisis dampak yang terjadi pada program FEATI namun masih dalam versi program P3TIP sebelum berubah nama menjadi FEATI. Inti atau tujuan dari penelitian ini juga sama masih dalam lingkup menganalisis apakah P3TIP dapat meningkatkan pendapatan petani melalui pembelajaran tentang teknologi dan informasinya, menganalisis apakah P3TIP dapat meningkatkan partisipasi peserta dalam perencanaan kegiatan penyuluhan dan kegiatan masyarakat pada umumnya, serta menganalisis apakah FMA dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan usahanya. Pada metode penelitiannya pun sama-sama menggunakan uji t dengan nilai uji t sebesar  $-4,763$  ( $\alpha=5$  persen). Sama halnya dengan penelitian Yuwono (2012) pada seminar hasil yang mengkaji tentang FEATI dalam penelitiannya dan Tujuan dari penelitian ini adopsi teknologi yang dilakukan untuk menelaah peran FEATI dalam pemberdayaan petani untuk mendukung kedaulatan pangan khususnya pada komoditas ternak Kambing-Domba di Jawa Tengah. Dari adanya persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga kedua penelitian tersebut dapat dijadikan pembandingan serta masukan untuk penelitian skripsi ini.

## 2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

### 2.2.1 Sumberdaya Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada

abad 18 atau zaman renaissance, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pembedayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam, yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

### **2.2.2 Konsep Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkutat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan

operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai naïve paradigm. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*. Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann, tiga pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan

mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

### **2.2.3 Penguatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Korten ( 1984), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Ada alasan untuk yakin bahwa paradigma seperti itu dewasa ini sedang muncul dari proses penemuan sosial kolektif sedunia. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984).

Perbedaan paradigma pembangunan yang mementingkan produksi yang dewasa ini unggul dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat sebagai tandingannya, mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Khususnya pemahaman akan perbedaan itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat.



Penyadaran diri (*conscienzazione*), satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Paulo Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat yang tersekap dalam kemiskinan dan sering menghayati kehidupan mereka dalam keterpencilan (isolasi) dan kekumuhan, harus diubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal dapat menjadi lain, dan tersedia alternatif-alternatif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu petani dan nelayan (sasaran) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Belajar dari pengalaman menunjukkan bahwa ketika peran penguasa sangat dominan dan peranserta masyarakat di pandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan. Penguatan peranserta masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda demokratisasi lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan atas program-program pembangunan yang ditujukan kepadanya adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda dan urutan prioritas.

Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui

pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

### 1. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

### 2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

### 3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak

juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

#### **2.2.4 Pemberdayaan Menuju Petani Kecil Mandiri**

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat.

Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat 'bungkus baru namun isi lama'. Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, 'model ekonomi kerakyatan' secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini.

Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. (Sasono, 1999). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian petani dan nelayan itu, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1999).

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mahmudi (1999) adalah merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja dituntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi,2001) menuju kemandirian petani dan nelayan kecil, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro–makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi policy input dan policy reform sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan/pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat/lokal di wilayah tugasnya masing-masing.
2. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.
3. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat

dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

4. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.
5. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, topdown dan linier (Sumardjo, 1998) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah.
6. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.
7. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan

usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).

8. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

## **2.3 Tinjauan Tentang Program FEATI**

### **2.3.1 Pengertian Program FEATI**

FEATI (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information / FEATI Project) adalah program unik yang diluncurkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian pada November 2007 dan mulai kegiatan pada tahun 2008 dengan bantuan pinjaman dari Bank Dunia. Keunikan program FEATI awalnya dipicu oleh acuan harapan kesuksesan implementasi UU no 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Program FEATI diadakan berdasarkan prinsip keaktifan institusi pendukung dan kelembagaan di pedesaan dalam penelitian dan sistem penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani dan mampu merespon berbagai perubahan di bidang pertanian. Jiwa dari program adalah mendemonstrasikan nilai – nilai dari sistem gabungan penyedia jasa di bidang pertanian. Selain itu, dalam program ini juga akan ditelaah kompleksitas suatu pendekatan yang menggabungkan dukungan masyarakat dan swasta untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pelayanan jasa pertanian sesuai dengan kapasitas kelembagaan petani dan penguatan institusi penyedia jasa pertanian.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSMP) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa FEATI merupakan satu-satunya program pemberdayaan petani yang menggunakan pendekatan “non-fisik” langsung terhadap petani. Petani diberi kepercayaan penuh untuk mengelola kegiatan inti FEATI yaitu pembelajaran FMA. Dari mulai merencanakan, menentukan topik, menyusun proposal, memilih narasumber, menganggarkan dana, melaksanakan,

memonitor dan melaporkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh petani sendiri. Bila program pemberdayaan petani lainnya, Pemerintah atau Donor lain langsung menyediakan bantuan modal kepada petani, namun FEATI nihil bantuan modal nominal, meskipun kelompok tani sudah siap mengembangkan usaha tani dengan mengimplementasikan teknologi yang mereka peroleh saat pembelajaran pada FMA. Dengan program FEATI paradigma penyuluhan pertanian yang tadinya terfokus pada peningkatan produksi, bergeser ke peningkatan kesejahteraan petani.

### **2.3.2 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Program FEATI**

FEATI bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan keluarga petani dan organisasi petani mengakses informasi, teknologi, modal dan sarana produksi untuk mengembangkan usaha agribisnis dan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta. Secara umum tujuan program FEATI adalah untuk mengembangkan Sistem Penyuluhan Berdasarkan Kebutuhan Petani yang di fokuskan untuk memenuhi permintaan pasar. Program ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian sebagai implementasi dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan tujuan: (1) memperkuat penyuluhan yang berorientasi kebutuhan petani; (2) memperkuat kelembagaan penyuluhan dan kapasitas SDM; (3) memperkuat pengkajian dan diseminasi teknologi; (4) pengembangan sistem informasi IPTEK dan; (5) dukungan untuk kebijakan penyuluhan dan manajemen (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2012).

Program FEATI memprioritaskan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan petani melalui perbaikan sistem informasi, peningkatan kapasitas organisasi petani berorientasi agribisnis, dan pengembangan teknologi sebagai upaya meningkatkan daya saing produksi hasil pertanian. Strategi ini menjadi bagian dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dari tahun 2010 – 2014, yang menekankan pentingnya diversifikasi untuk meningkatkan efisiensi, kesejahteraan petani, serta daya saing hasil pertanian dalam era globalisasi.

### 2.3.3 Kerangka Operasional Program FEATI

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian tahun 2012 menjelaskan bahwa pada Juni 2005, Pemerintah Indonesia telah menetapkan agenda Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat kehutanan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan hasil-hasil pertanian, laut, dan hutan. RPPK menjadi bagian utama dari Agenda Nasional Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

RPPK memprioritaskan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan petani melalui perbaikan sistem informasi, pelatihan agribisnis, peningkatan anggaran untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi jangka panjang sebagai upaya meningkatkan daya saing produksi hasil pertanian. Strategi ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari Pemerintah Indonesia, 2005 – 2009, yang menekankan pentingnya diversifikasi untuk meningkatkan efisiensi, kesejahteraan petani, serta daya saing hasil pertanian dalam era globalisasi. RPJM menetapkan bahwa revitalisasi pertanian melalui pengembangan kemitraan agribisnis untuk meningkatkan pendapatan petani dan diversifikasi yang lebih luas untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian 3,9%. RPJM menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan elemen utama dalam strategi untuk penurunan angka kemiskinan.

Kementerian Pertanian saat ini telah berupaya untuk mencari peluang membangun kemitraan agribisnis dengan pihak swasta untuk memperkuat akses ke pasar, serta mempromosikan penelitian yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani serta meningkatkan pelayanan kepada petani miskin. Untuk melaksanakan isu-isu yang teridentifikasi dalam RPPK dan RPJM, Kementerian Pertanian telah menyusun undang-undang penyuluhan pertanian termasuk perikanan dan kehutanan. Undang-undang tersebut saat ini telah disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Oktober 2006. Undang-undang tersebut merupakan upaya untuk membangun kerangka kerja dalam membangun penyuluhan di masa yang akan datang.



Proyek Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information / FEATI Project) dirancang untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi penyuluhan pertanian. Proyek FEATI mencakup kegiatan-kegiatan yang merupakan unsur dari revitalisasi penyuluhan pertanian, yaitu :

1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan;
2. Pengembangan kelembagaan petani;
3. Penguatan ketenagaan penyuluhan;
4. Perbaikan system dan metode penyuluhan;
5. Perbaikan penyelenggaraan penyuluhan;
6. Penguatan dukungan teknologi pada usaha tani;
7. Perbaikan pelayanan informasi pertanian.

Untuk mencapai tujuan proyek, kegiatan utama proyek dikelompokkan dalam 5 komponen, yaitu :

1. Komponen A : Penguatan sistem penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani

Komponen ini bertujuan untuk memberdayakan petani dalam merencanakan, melaksanakan penyuluhan serta meningkatkan kemampuan mereka dalam : (i) mengadopsi inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar; (ii) mengembangkan kemampuan mengelola agribisnis, dan (iii) mengembangkan kemitraan usaha dengan berbagai pihak di tingkat desa, kabupaten dan provinsi.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui : (i) penguatan kemampuan petani dalam berorganisasi yang memiliki akuntabilitas di seluruh tingkatan, serta penguatan organisasi petani yang telah ada; (ii) memfasilitasi kemitraan petani dengan berbagai pihak (swasta dan pemerintah), antara lain melalui penyediaan dana hibah FMA, serta (iii) mengembangkan pelayanan penyuluhan swasta dan pemerintah dalam memfasilitasi petani memperoleh akses teknologi, pasar dan pengetahuan lainnya.

2. Komponen B : Penguatan kelembagaan dan kemampuan aparat

Komponen ini bertujuan untuk mengembangkan system penyuluhan yang terdesentralisasi melalui kerjasama antara penyedia layanan penyuluhan swasta dengan kelompok tani dan perusahaan untuk keuntungan bersama. Untuk keperluan

tersebut kegiatan-kegiatan dari komponen ini mencakup penyediaan pelatihan, perbaikan infrastruktur beserta perlengkapannya, serta penyediaan dana operasional dari pemerintah untuk pelayanan penyuluhan di kecamatan dan kabupaten.

### 3. Komponen C : Perbaikan pengkajian dan diseminasi teknologi

Komponen ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani dan pasar serta meningkatkan kapasitas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) supaya berfungsi lebih efektif. FEATI akan memfasilitasi dukungan untuk penyusunan program yang inovatif untuk memperbaiki kelembagaan penelitian dan pengembangan teknologi milik pemerintah yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, fasilitas, perbaikan mobilitas, serta meningkatkan kualitas penelitian serta kesesuaiannya melalui peningkatan kemitraan dengan pihak swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat beserta mitra lembaga penyuluhan dan petani.

### 4. Komponen D : Penguatan pelayanan sistem informasi pertanian

Komponen ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya informasi atau tidak teraksesnya informasi yang berkaitan dengan informasi dan teknologi pertanian, serta terbatasnya hubungan kerja diantara penyedia layanan informasi dan antara penyedia layanan informasi dengan masyarakat pengguna (petani, pedagang dan para pengusaha). Penerapan perangkat lunak akan dimulai dengan membangun dan memperkuat tugas Kementerian Pertanian dalam pelayanan informasi, yang mencakup :

- a. Pembangunan e-Petani portal, yaitu pemberian pelayanan “on-line” untuk perorangan yang berkaitan dengan aspek teknologi dan pasar. Pelayanan ini akan memungkinkan para pengguna mengirimkan permintaan informasi yang diperlukan dengan menggunakan layanan pesan singkat/SMS telepon seluler dan GPRS;
- b. Harga komoditas dan informasi pasar dimana petani dapat memperoleh informasi terkini tentang harga di tempat dan pasar;
- c. Membangun keterkaitan antara pengguna layanan agribisnis dan penyedia layanan informasi melalui penerapan perangkat lunak yang memungkinkan para pengguna

layanan informasi menyampaikan informasi untuk menawarkan atau membeli sarana produksi, hasil produksi pertanian, dan jasa lainnya. Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menyediakan koneksi internet murah. Sistem e-Petani akan memfasilitasi penggunaan Compact Disk (CD), radio dan video serta bahan audio lainnya yang akan di produksi secara berkala oleh lembaga penelitian dan penyuluhan, yang saat ini masih dimanfaatkan oleh sebagian orang yang berkunjung ke BPTP atau lembaga penyuluhan di kabupaten. Sistem pelayanan informasi dan pengetahuan secara bertahap akan melibatkan aparat BPTP dan lembaga penyuluhan setempat sebagai konsultan untuk e-Petani. Disamping itu, komponen ini akan mendukung beberapa kegiatan proyek dalam bentuk pelatihan dan penyediaan informasi tentang proyek secara on-line, termasuk rincian tentang proses pemberian dan pelaksanaan dana FMA, eprocurement, dan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi proyek.

#### 5. Komponen E : Dukungan kebijakan dan manajemen proyek

Komponen ini akan menyediakan dukungan untuk pelaksanaan Undang Undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Salah satu kegiatan dari komponen ini adalah menyusun saran-saran sebagai masukan untuk penyusunan draft Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan desentralisasi penyuluhan dan sosialisasinya. Disamping itu, komponen ini juga akan mendukung manajemen dan pelaksanaan proyek termasuk penyediaan kendaraan dan perlengkapan kantor untuk Unit Pengelola Proyek di Pusat (Badan Pengembangan SDM Pertanian), Provinsi dan Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan para pengelola proyek di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, akan dilaksanakan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan proyek termasuk administrasi proyek, pengelolaan keuangan, pengadaan barang, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan lain yang dicakup dalam komponen ini adalah survey data dasar (*Benchmark survey*), studi evaluasi dampak proyek, supervisi tentang rencana pengelolaan lingkungan.

Untuk membantu pengelola proyek di pusat dan daerah, sejumlah konsultan akan dikontrak dengan berbagai keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek di pusat dan daerah

## 2.4 Tinjauan Tentang Kegiatan FMA

### 2.4.1 Pengertian FMA

Dalam Pedoman FMA tahun 2007 menjelaskan bahwa FMA (*Farmers Managed extension Activities*) adalah proses perubahan perilaku, pola pikir, dan sikap petani dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis melalui pembelajaran yang berkelanjutan dilaksanakan dengan pendekatan belajar sambil berusaha (*learning by doing*) yang menitikberatkan pada pengembangan kapasitas managerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan pelaku utama dalam rangka mewujudkan wirausahawan (*entrepreneur*) agribisnis yang handal. *Output* yang diharapkan bukan sekedar pengembangan aspek PKS (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) petani dalam hal produksi pertanian, akan tetapi dari proses pembelajaran ini secara riil diharapkan mampu membangun agribisnis dari hulu sampai ke hilir.

Tujuan umum pelaksanaan FMA adalah untuk meningkatkan kemampuan petani sebagai wirausaha agribisnis dalam mengelola kegiatan penyuluhan/pembelajaran di desa dalam mengembangkan agribisnisnya sehingga pelaku utama mampu melaksanakan prinsip-prinsip agribisnis dalam melaksanakan usahanya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama.

Tujuan khusus pelaksanaan FMA adalah meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam:

1. Mengidentifikasi peluang dan kebutuhan pasar yang potensial sebagai dasar untuk menyusun rencana agribisnisnya (*business plan*);
2. Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan agribisnis, dan alternatif-alternatif pemecahannya;
3. Memilih usaha yang paling menguntungkan serta mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi, dan sarana yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usahanya secara berkelanjutan;

4. Menerapkan prinsip - prinsip agribisnis (orientasi pasar, menguntungkan, memiliki kepercayaan jangka panjang, kemandirian, dan daya saing usaha, komitmen terhadap kontrak usaha) dalam pelaksanaan usahanya;
5. Mengembangkan jejaring dengan berbagai sumber informasi teknologi, pemasaran, permodalan dalam rangka pengembangan agribisnisnya;
6. Mengembangkan kemitraan usaha dengan berbagai pihak;
7. Mengembangkan dirinya menjadi pengusaha agribisnis yang profesional (*entrepreneur*);
8. Menumbuhkan dan mengembangkan wadah pembelajaran bagi pelaku utama dan organisasi petani (kelompok tani/gapoktan/asosiasi), untuk menghasilkan pelaku utama sebagai *entrepreneur* yang mandiri di bidang pertanian;
9. Menciptakan penyuluh swadaya sebagai motivator di pedesaan, terutama untuk menggerakkan, membimbing dalam pelaksanaan agribisnis yang mampu membangun jaringan antar pelaku agribisnis pada satuan wilayah Desa dan Kecamatan; serta
10. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pembelajaran /penyuluhan di Desa (pos penyuluhan pertanian) untuk menjamin keberlanjutan penyuluhan oleh, dari, dan untuk pelaku utama dalam pengembangan agribisnis.

#### **2.4.2 Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan FMA**

1. Partisipatif : Kegiatan *FMA* harus melibatkan pelaku utama dan pelaku usaha untuk berperan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, termasuk kelompok terpinggirkan (*disadvantaged groups*) yaitu keluarga miskin dan perempuan. Partisipasi akan berkembang dalam berbagai cara sesuai keadaan spesifik lokasi, dan pelibatan sejak proses perencanaan akan menumbuhkan perasaan memiliki dan jaminan keberlanjutan program.
2. Demokratis : Setiap keputusan dibuat melalui musyawarah atau kesepakatan sebagian besar pelaku utama dan pelaku usaha untuk menjamin dukungan yang berkelanjutan dan rasa memiliki dari masyarakat. Seluruh kegiatan *FMA*, dari

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dilaksanakan dengan prinsip “dari petani ke petani dan untuk petani”.

3. Desentralisasi : Kegiatan penyuluhan pertanian direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) untuk memperbaiki dan mengembangkan agribisnisnya serta meningkatkan rasa memiliki terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil dari kegiatan penyuluhan.
4. Keterbukaan : Manajemen dan administrasi penggunaan dana FMA harus diketahui dan diumumkan ke masyarakat baik di tingkat Desa.
5. Akuntabilitas : Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana untuk pelaksanaan FMA harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Desa.
6. Sensitif gender : Kegiatan FMA memberikan manfaat kepada pelaku utama dan pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan termasuk mereka berasal dari kelompok yang terpinggirkan dalam pelaksanaan agribisnisnya.
7. Kemandirian : Pelaku utama dan pelaku usaha, keluarga dan masyarakat tani, serta seluruh anggota organisasi petani (laki-laki dan perempuan) memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan usahatani yang menguntungkan dan berkelanjutan tanpa harus bergantung kepada bantuan Pemerintah.
8. Belajar sambil berusaha : kegiatan pembelajaran dirancang terintegrasi dengan pelaksanaan usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar.

#### **2.4.3 Ciri-ciri Pembelajaran Agribisnis dalam FMA**

1. Kegiatan pembelajaran di perdesaan sesuai dengan produk/komoditi yang dibutuhkan pasar dan disepakati dalam rembugtani desa/organisasi petani dalam rangka mengembangkan agribisnis berskala ekonomi.
2. Kegiatan pembelajaran yang diajukan berdasarkan pada kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) dalam melaksanakan agribisnisnya dan disepakati dalam rembugtani di tingkat desa/organisasi petani.
3. Proses pembelajaran diutamakan difasilitasi oleh pelaku usaha yang berhasil / praktisi ahli/penyuluh swadaya yang berkaitan dengan produk/komoditi sesuai dengan keahlian yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang diusulkan.

4. Proses pembelajaran di Desa dilaksanakan sambil melaksanakan kegiatan agribisnisnya (*learning by doing*).
5. Proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan belajar berdasarkan pengalaman dan menemukan sendiri dalam pengembangan agribisnisnya (*discovery learning*).
6. Materi, metode dan durasi/waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta produk/komoditi yang diusahakan dalam satu siklus usaha.

#### 2.4.4 Proses Pelaksanaan FMA

Rembugtani Desa adalah forum yang anggotanya terdiri dari pengurus kelompok tani ditambah dengan dua orang perwakilan dari masing - masing kelompok tani serta wakil dusun (laki-laki dan perempuan) yang dipilih secara demokratis oleh anggotanya. Rembug tani bertugas untuk :

1. Memilih pengurus pengelola FMA dan penyuluh swadaya;
2. Menetapkan rencana usaha berkelompok (*business plan*) sesuai dengan hasil kajian pengembangan agribisnis perdesaan;
3. Menetapkan kegiatan pembelajaran yang akan diusulkan untuk didanai P3TIP berdasarkan program penyuluhan desa sesuai hasil identifikasi dan analisis kajian pengembangan agribisnis perdesaan; dan
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pemanfaatan dana stimulant penguatan permodalan di desa baik yang didanai oleh dana FMA maupun dari sumber-sumber lain.

Mengelola FMA desa, perlu dibentuk unit yang akan mengelola kegiatan penyuluhan Desa yang pengurusnya dipilih secara demokratis oleh rembugtani Desa.

Unit pengelola FMA bertanggung jawab untuk :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran agribisnis dan pemanfaatan dana stimulant penguatan permodalan yang dibiayai dari dana *FMA*;
2. Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan, membuat pembukuan terhadap penerimaan/ pengeluaran dana untuk pembelajaran agribisnis dan pemanfaatan dana stimulan penguatan permodalan yang dibiayai dari dana *FMA*;

3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana FMA desa melalui penyediaan informasi tentang penggunaan dana FMA kepada masyarakat desa (bebas dari korupsi);
4. Menjamin tersedianya peluang yang sama untuk keikutsertaan seluruh komponen masyarakat desa dalam pemanfaatan dana FMA (bebas dari nepotisme dan kolusi);
5. Menjamin keberlanjutan dan penyebarluasan FMA;
6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan FMA desa; dan
7. Membuat laporan teknis kegiatan dan keuangan FMA.

Pengurus unit pengelola FMA minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan penyuluh swadaya. Persyaratan pengurus harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Jujur, berwawasan luas tentang organisasi kemasyarakatan;
2. Berdedikasi untuk mengelola kegiatan FMA;
3. Tidak mempunyai tunggakan hutang dengan pihak lain;
4. Memiliki kemampuan untuk membantu proses pembelajaran petani dalam mengembangkan usahanya; dan
5. Bersedia meluangkan waktu untuk mengelola seluruh kegiatan.

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua : bertanggungjawab pada aspek - aspek FMA baik teknis maupun administrasi.
2. Sekretaris: bertanggungjawab untuk memonitor dan mencatat pelaksanaan kegiatan penyuluhan didesa dan pemanfaatan dana stimulan penguatan permodalan dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis.
3. Bendahara: bertanggungjawab secara administrasi atas penerimaan/ pengeluaran dana dan masalah keuangan lainnya sesuai dengan dana FMA.
4. Penyuluh swadaya : bertanggungjawab untuk merencanakan, memandu proses kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan agribisnis.

Pengurus unit pengelola FMA dan penyuluh swadaya dilatih melalui pelatihan teknik fasilitasi FMA, pelatihan bagi unit pengelola FMA, pembinaan, dan bimbingan teknik lainnya yang dilakukan secara rutin oleh tim pemandu lapang. Pelatihan



reorientasi pengelolaan FMA untuk meningkatkan kualitas kemampuan unit pengelola FMA dan penyuluh swadaya.

Kegiatan pembelajaran FMA dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan agribisnis berdasarkan produk/ komoditi sesuai dengan permintaan pasar dalam satu siklus usaha dengan skala ekonomi untuk produk/komoditi yang diusahakan. Kriteria peserta pembelajaran adalah :

1. Pelaku utama yang melaksanakan agribisnis sesuai dengan produk/komoditi yang diperlukan pasar dan telah ditetapkan melalui pertemuan rembug tani desa;
2. Bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam satu siklus usaha;
3. Berkomitmen untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam kegiatan usahanya;
4. Bersedia bekerjasama antar anggota kelompok belajar dalam penyediaan sarana usaha, pemasaran, dan lain-lain; serta
5. Bersedia untuk menyertakan sumberdaya yang dimiliki secara swadaya dalam satuan pelaksanaan agribisnis berskala ekonomi.

Kriteria keanggotaan *FMA* tingkat Kabupaten sebagai berikut :

1. Komisi penyuluhan Kabupaten

Komisi penyuluhan Kabupaten dibentuk oleh Bupati yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Keanggotaan komisi penyuluhan terdiri dari wakil Pemerintah dan non Pemerintah yang memiliki keterkaitan dan kepedulian terhadap penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten. Perbandingan perwakilan organisasi Pemerintah dan non Pemerintah harus seimbang, dengan jumlah anggota perempuan minimal 30% yang dapat menyuarakan kaum perempuan yang berusaha disektor pertanian.

Komposisi keanggotaan komisi penyuluhan Kabupaten mewakili unsur Pemerintah, organisasi petani/LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian serta perwakilan organisasi yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan pertanian/agribisnis. Komisi penyuluhan kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap penilaian proposal FMA yang disampaikan oleh tim verifikasi FMA kabupaten yang selanjutnya disampaikan ke PPK P3TIP kabupaten untuk didanai kegiatannya melalui dana hibah FMA.

## 2. Tim verifikasi proposal FMA

Tim verifikasi terdiri dari staf senior yang memiliki keahlian teknis di bidang pertanian, dan keuangan yang berasal dari lembaga penyuluhan Kabupaten, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, yang ditugaskan oleh komisi penyuluhan Kabupaten untuk membantu sekretariat komisi penyuluhan Kabupaten dalam penyelenggaraan FMA di Desa. Tim verifikasi bertugas melakukan penilaian terhadap proposal FMA yang disampaikan oleh pengurus unit pengelola FMA Desa, penilaian mencakup :

- a. Kelayakan dari segi teknis dan keuangan, serta manfaat dari kegiatan yang diusulkan dalam proposal;
- b. Kesesuaian dengan persyaratan untuk memperoleh dana FMA; dan
- c. Aspek lingkungan yang tidak membahayakan.

Dana FMA desa, hanya digunakan untuk membiayai kegiatan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh kelompok tani/gapoktan desa yang bersifat strategis sesuai dengan ruang lingkup dan materi FMA. Dana pembelajaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Biaya pembelajaran sesuai dengan proposal yang telah disetujui (studi petani, sekolah lapangan, demonstrasi, magang, pelatihan, dll)
2. Modal usaha untuk keperluan seluruh proses usaha yang dilaksanakan oleh peserta pembelajaran
3. Biaya Operasional
  - a. Gaji, upah yang rutin diberikan mingguan/bulanan bagi pengurus FMA dan
  - b. Transpor bagi peserta rapat/pertemuan/rembugtani yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
4. Transport kegiatan FMA
  - a. Transport bagi tenaga harian lepas - tenaga bantu PPL dan
  - b. Transport bagi peserta pembelajaran kecuali sewa kendaraan untuk studi banding, magang, dan kunjungan petani antar desa.
5. Kegiatan yang terkait dengan FMA dan tidak dibiayai dari dana FMA, antara lain kajian pengembangan agribisnis perdesaan, penyusunan rencana usaha

berkelompok (business plan), penyusunan program penyuluhan desa, serta penyelenggaraan forum penyuluhan pertanian perdesaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dibiayai FMA desa dari sumber lain, yaitu dari swadaya masyarakat, APBN, dan APBD (Deptan, 2009).

#### **2.4.5 Metode Pelaksanaan FMA**

Metode yang digunakan dalam kegiatan FMA didasarkan atas kebutuhan pelaku utama (laki-laki dan perempuan) dalam rangka melaksanakan agribisnisnya yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan, antara lain :

1. Studi petani (termasuk dalam temu teknologi dan temu lapangan);
2. Sekolah lapangan agribisnis (termasuk demonstrasi cara, hasil, dan hari lapangan petani);
3. Magang; dan
4. Studi banding

#### **2.4.6 Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dalam hasil kegiatan pembelajaran melalui FMA adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya pengembangan agribisnis perdesaan melalui pengembangan komoditas unggulan
2. Terbentuknya wadah pembelajaran agribisnis di perdesaan
3. Terbentuknya penyuluh swadaya agribisnis

### **2.5 Tinjauan Tentang Usahatani**

Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya (Adiwilaga, 1982).

Menurut Mubyarto (1986) dan Soekartawi (1987), biaya usaha tani dibedakan menjadi: Biaya tetap (fixed cost): biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Yang termasuk biaya tetap adalah sewa tanah, pajak, alat pertanian, dan iuran irigasi; Biaya tidak

tetap (variable cost) biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, seperti biaya saprodi (tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan bibit)

Pendapatan kotor usahatani atau penerimaan usahatani sebagai nilai produksi total usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Untuk menaksir komoditi atau produk yang tidak dijual, digunakan nilai berdasarkan harga pasar yaitu dengan cara mengalikan produksi dengan harga pasar (Soekartawi, dkk, 1986). Soeharjo dan Patong (1973) dan Hernanto (1989) menyatakan penerimaan usahatani dapat berupa: (1) hasil penjualan tanaman, ternak, ikan, atau produk yang akan dijual; (2) produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan kegiatan; dan 3) kenaikan nilai investasi.

Soeharjo dan Patong (1973) dan Mubyarto (1986) mengatakan bahwa berusahatani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi di lapangan akan dinilai dari penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selisih antara penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan merupakan pendapatan usahatani.

Dinas Pertanian menyatakan perkebunan rakyat merupakan usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan/atau diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan atau tidak berbadan hukum. Luasan maksimal adalah 25 hektar, atau pengelola tanaman perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha (BMU). Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengelola tanaman perkebunan dan pemelihara tanaman perkebunan. Pengelola Tanaman Perkebunan adalah perkebunan rakyat yang diselenggarakan secara komersial dan mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih besar dari BMU. Sedangkan, pemelihara tanaman perkebunan adalah perkebunan rakyat yang diselenggarakan atas dasar hobi atau belum diusahakan secara komersial dan mempunyai jumlah pohon lebih kecil dari BMU.

Petani Pekebun adalah petani yang membudidayakan/mengusahakan tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri, dan mempunyai jumlah pohon lebih besar

dari BMU. Jumlah Petani Pekebun adalah banyaknya rumah tangga petani pekebun di desa tersebut yang membudidayakan/mengusahakan tanaman perkebunan

## 2.6 Tinjauan Tentang Pendapatan Petani

Menurut Adiwilanga(1992), pendapatan diperlukan oleh keluarga petani untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tidak tetap melainkan terus menerus. Oleh karena itu, pendapatan yang dimaksimal itulah yang selalu diharapkan petani dari usaha tani. Di tambahkan oleh (Mosher, 1991), pendapatan merupakan produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang setelah dikurang biaya yang dikeluarkan selama kegiatan usaha tani.

Menurut Aukley (1983), pendapatan seseorang individu di definisikan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari jasa – jasa produksi yang diserahkan pada suatu atau diperolehnya dari harta kekayaannya, sedangkan pendapatan tidak lebih dari pada penjumlahan dari semua pendapatan individu.

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan dibedakan atas dua pengertian yaitu:

1. Pendapatan kotor usahatani. Sebagai nilai produksi usahatani dikalikan harga dalam jangka waktu tertentu baik yang jual maupun yang dikonsumsi sendiri, digunakan untuk pembayaran dan simpanan atau ada digudang pada akhir tahun.
2. Pendapatan bersih usahatani. Merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan usahatani dengan pengeluaran total usahatani.

Hubungan biaya dengan pendapatan dapat diperitungkan untuk seluruh usaha tani sebagai satu unit selama periode tertentu, misalnya pada musim tanam. Dalam hal ini semua biaya semua produksi dijumlahkan kemudian di bandingkan dengan pendapatan diperoleh (Hadisaputro, 1985).

Menurut Soekartawi, dkk (1994), pendapatan keluarga mencerminkan tingkat kekayaan besarnya modal yang dimiliki petani. Pendapatan yang besar mencerminkan dana yang besar dalam usahatani, sedangkan pendapatan yang rendah dapat menyebabkan menurunnya infestasi dan upaya pemupukan modal, pendapatan bersih petani hasil kotor dari produksi yang dinilai dengan uang kemudian hasil kotor tersebut dikurangi dengan biaya produksi dan biaya pemasaran.

### 2.6.1 Peranan Penyuluhan dalam peningkatan Pendapatan

Menurut Swanson (2006), jika sistem penyuluhan pertanian nasional di negara berkembang adalah untuk bertahan sebagai institusi yang efektif, mereka harus mendapatkan kembali fokus pada petani terorganisir (yaitu, membangun modal sosial), meningkatkan pendapatan pertanian dan lapangan kerja di perdesaan dan membantu untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan. Dalam rangka penyuluhan untuk menasehati petani skala kecil dan menengah tentang alternatif tanaman atau produk bernilai tinggi yang dapat mereka produksi dan pasarkan, adalah penting bahwa penyuluhan menjadi lebih digerakkan oleh pasar. Untuk memulai ada empat penting aksioma yang harus diikuti sebagai sistem penyuluhan bergeser ke tanaman pangan bernilai tinggi, ternak dan perusahaan lain (Swanson, 2006).

1. Jika tidak ada pasar, jangan mendorong petani untuk memproduksi tanaman tertentu atau produk. Oleh karena itu, tugas pertama yang akan dilaksanakan adalah menilai potensi pasar untuk berbagai tanaman pangan bernilai tinggi atau produk yang dapat berhasil diproduksi di berbagai kota-kota/ blok dalam setiap kabupaten.
2. Jika tanaman (atau produk) tidak dapat berhasil tumbuh atau dihasilkan dalam kabupaten/kabupaten, karena tidak menguntungkan kondisi agroekologinya, kemudian melihat untuk tanaman yang lebih menjanjikan yang dapat berhasil dipasarkan.
3. Jika petani tidak dapat mudah membawa produk ke pasar, dengan tetap menjaga kualitas, mencari produk yang lebih menjanjikan yang dapat berhasil dipasarkan.
4. Diversifikasi ke jumlah yang cukup untuk tanaman/produk yang bernilai tinggi cocok untuk asosiasi petani yang berbeda dalam setiap kabupaten/kabupaten. Pendekatan ini akan mengurangi resiko dengan tidak menjenuhkan pasar dengan satu atau dua tanaman/produk, sehingga mendorong harga turun.